



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS TANJUNGPURA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : R. M. RUSTAMAJI
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN, KERJA SAMA DAN SISTEM INFORMASI
3. NHK : 153540

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.390.000.000

1. Tanah Seluas 360 m2 di KAB / KOTA PONTIANAK, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah Seluas 240 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 242 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI , HIBAH TANPA AKTA , Rp. 900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 367.000.000

1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA 1.5 SV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 107.000.000
2. MOBIL, HYUNDAI STARGAZER PRIME Tahun 2022, HIBAH TANPA AKTA Rp. 243.000.000
3. MOTOR, YAMAHA BEJ A/T SEPEDA MOTOR SOLO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 23.990.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 26.950.000



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----
Rp. 2.807.940.000

III. HUTANG

Rp. ----
Rp. 2.807.940.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.